



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi)

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Richman Nurdiansah

0221 17 098

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JUNI 2022



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KUANGAN
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi)

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022

Richman Nurdiansah

0221 17 098

Disetujui

Ketua Penguji Sidang

(Drs. Monang Situmorang, AK., MM., CA)



Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak.,
CFE, CFA, CA, QIA., CGCAE., ASEAN CPA, CIAE)



Anggota Komisi Pembimbing

(Enok Rusmanah, S.E., M.Acc)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richman Nurdiansah

NPM : 0211 17 098

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 07 Juni 2022



Richman Nurdiansah

0221 17 098

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RICHMAN NURDIANSAH 022117098. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi). Di bawah bimbingan: ERNADHI SUDARMANTO dan ENOK RUSMANAH.2021.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kendala laporan yang relevan dan andal diantaranya materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian dilakukan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Teknik pemilihan sampel yaitu non probability sampling. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi rank spearman pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Metode statistik uji kualitas data menggunakan uji validitas dan reabilitas. Uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji t.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi rank spearman menunjukkan memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 70,7% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil uji t mendapatkan hasil H_0 ditolak atau H_1 diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi).” Adapun Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini.
2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi setiap umatnya.
3. Jajat, Ade selaku orang tua tercinta dan kakak-kakak yang selama ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak akan tergantikan oleh apapun.
4. Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Dr. Hendro Sasongko, AK., M.M., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ernadhi Sudarmanto, AK., M.M., M.Ak., CFE., Cfra., CA., QIA., CGCAE., ASEAN., CPA., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan doa, dukungan,

pengarahan, dorongan, masukan selama masa bimbingan kepada penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.

8. Enok Rusmanah, S.E., M.Acc., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan doa, dukungan, pengarahan, dorongan, masukan selama masa bimbingan kepada penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.
9. Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., AK., selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.
10. Seluruh staf dosen Universitas Pakuan yang telah memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Pakuan.
11. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Pakuan.
12. Linda Sundari, yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas peralatan, masukan, serta membantu penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.
13. Seluruh teman-teman rumah dan teman kelas C Akuntansi yang selalu memberikan advice dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu selama ini. Besar harapan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Sukabumi, Juni 2022

Richman Nurdiansah

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Akademis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akuntansi Pemerintahan	9
2.1.1 Karakteristik Organisasi Pemerintahan	9
2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	11
2.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan	11
2.2 Sistem Akuntansi	12
2.2.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	12
2.2.2 Sistem dan Prosedur Pencatatan	15
2.2.3 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi	17
2.2.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.3.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23

2.3.4 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	26
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Rerangka Pemikiran.....	28
2.4.1 Penelitian Sebelumnya	28
2.4.2 Rerangka Pemikiran	41
2.5 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	45
3.2.1 Objek Penelitian.....	45
3.2.2 Unit Analisis Penelitian	45
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	46
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	46
3.4.1 Variabel Independen.....	46
3.4.2 Variabel Dependen	46
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	48
3.6 Metode Pengumpulan Data	48
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	48
3.7.1 Uji Validitas.....	48
3.7.2 Uji Reliabilitas	49
3.7.3 Analisis Koefisien Korelasi <i>Rank Spearman</i>	50
3.7.4 Analisis Koefisien Determinasi	52
3.7.5 Pengujian Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Sukabumi	54
4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	56
4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	60
4.2.1 Deskripsi Profil Responden.....	60
4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	61
4.3 Analisis Data	69

4.3.1 Uji Validitas.....	69
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	71
4.3.3 Analisis Koefisien Korelasi <i>Rank Spearman</i>	71
4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi.....	72
4.3.5 Uji Hipotesis.....	73
4.4 Pembahasan.....	73
4.4.1 Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	73
4.4.2 Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum.....	74
4.4.3 Pembuatan Laporan Keuangan dan Dilaporkan Secara Periodik..	74
4.4.4 Kualitas Laporan Keuangan.....	75
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian.....	75
4.5.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2015-2020	4
Tabel 1.2 : Persentase Kenaikan dan Penurunan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2015-2020.....	4
Tabel 1.3 : Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini Tahun 2020	5
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 : Operasional Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	47
Tabel 3.2 : Koefisien Korelasi dan Taksiran	52
Tabel 4.1 : Profil Responden dan Hasil Penyebaran Kuisisioner	60
Tabel 4.2 : Kelompok Responden Berdasarkan Masa Bekerja.....	60
Tabel 4.3 : Kelompok Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4.4 : Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.5 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Usia.....	61
Tabel 4.6 : Gambaran Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	62
Tabel 4.7 : Prosedur Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum	64
Tabel 4.8 : Gambaran Mengenai Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik	65
Tabel 4.9 : Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Relevan.....	66
<u>Tabel 4.10 : Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Andal</u>	<u>67</u>
<u>Tabel 4.11 : Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Dapat Dibandingkan.....</u>	<u>68</u>
<u>Tabel 4.12 : Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Dapat Dipahami..</u>	<u>68</u>
Tabel 4.13 : Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	70
Tabel 4.14 : Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	70
Tabel 4.15 : Hasil Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan	71
Tabel 4.16 : Analisis Koefisien Korelasi <i>Rank Spearman</i>	72
Tabel 4.17 : Analisis Koefisien Determinasi	72
Tabel 4.18 : Analisis Uji t	73

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2.1 : Rerangka Pemikiran Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	27
Gambar 2.2 : Paradigma Rerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 : Garis Kontinum Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	63
Gambar 4.2 : Garis Kontinum Prosedur Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum.....	64
Gambar 4.3 : Garis Kontinum Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik	65
Gambar 4.4 : Garis Kontinum Relevan.....	69
<u>Gambar 4.5 : Garis Kontinum Andal</u>	<u>67</u>
<u>Gambar 4.6 : Garis Kontinum Dapat Dibandingkan.....</u>	<u>68</u>
<u>Gambar 4.7 : Garis Kontinum Dapat Dipahami</u>	<u>69</u>

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Lampiran 1 : Tanda Terima di Dinas Perumahan dan Pemukiman	81
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	82
Lampiran 3 : Hasil Olah Data	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh. Di era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance*, termasuk di Indonesia.

Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan reformasi di segala sektor pemerintahan termasuk yang diatur dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka tuntutan besar kepada sektor publik termasuk pemerintah daerah untuk mengelola, mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang diterima dari masyarakat. Melalui suatu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan selanjutnya diganti dengan PP NO 71 Tahun 2010.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001 melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi kembali menjadi UU No. 23 tahun 2014 dan diubah menjadi UU No. 9 tahun 2015, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan diubah menjadi PERPU No. 1 tahun 2020 dan ditetapkan dengan UU No. 2 tahun 2020, tidak terhenti sampai di situ selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dilakukannya reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan perundang- undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / Bupati /

Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Menurut Susanto & Halim (2018) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu substansi pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya (Tegor, Dkk 2021).

Aplikasinya ada beberapa di dalam pemerintah daerah termasuk Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi yang masih ada kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian,

standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Jika sistem akuntansi di Indonesia di tingkat pusat diatur oleh peraturan menteri keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan menteri dalam negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah disajikan sesuai SAP dan didukung dengan bukti yang cukup atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah disajikan sesuai dengan SAP akan tetapi tidak di dukung dengan bukti yang cukup ataupun sebaliknya, Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP/*Disclaimer*) berarti laporan keuangan yang dilaporkan tidak disajikan sesuai dengan SAP dan tidak di dukung dengan bukti yang cukup.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 menggambarkan kenaikan dari hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penurunan Wajar Dengan Pengecualian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Namun Badan Pemeriksa Keuangan masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (IHPS 1, 2021).

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidak efektifan. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama enam tahun, dari tahun 2015-2020, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam presentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana tersaji dalam tabel:

TABEL 1.1 Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2015-2020

Tahun	Opini								Σ
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2015	313	58	194	36	4	1	31	5	542
2016	378	70	141	26	0	0	23	4	542
2017	411	76	113	21	0	0	18	3	542
2018	443	82	86	16	0	0	13	2	542
2019	485	90	50	9	0	0	7	1	542
2020	486	90	49	9	2	0,3	4	0,7	541*

Sumber: Data diolah, 2021 www.bpk.go.id

Ket *)Sampai dengan semester I 2021

TABEL 1.2 Persentase Kenaikan Dan Penurunan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2015-2020

Tahun	Opini							
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%
2015	8%	58	-10%	36	0	1	1%	5
2016	12%	70	-10%	26	-1%	0	-1%	4
2017	6%	76	-5%	21	0	0	-1%	3
2018	7%	82	-6%	16	0	0	-1%	2
2019	7%	90	-7%	9	0	0	-1%	1
2020	0%	90	0%	9	0,3%	0,3	-0,3%	0,7

Sumber: Data diolah, 2021 www.bpk.go.id

TABEL 1.3 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini tahun 2020

No	Keterangan		
	Opini WTP menjadi <u>WDP</u>	Opini WTP menjadi TMP	Opini WTP menjadi TW
1	Pemkab Padang Lawas Utara	Pemkab Banggai Kepulauan	Pemkab Minahasa Utara
2	Pemkab Kepulauan Mentawai	Pemkab Pegunungan Bintang	
3	Pemkab Indramayu		
4	Pemkab Bandung Barat		
5	Pemprov Sulawesi Selatan		
6	Pemkab Bungo		
7	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir		
8	Pemkab Hulu Sungai Tengah		
9	Pemkab Kutai Timur		
10	Pemkab Bulu Kumba		
11	Pemkab Goa		
12	Pemkab Kepulauan Tanimbar		
13	Pemkot Bandar Lampung		
14	Pemkot Makasar		
15	Pemkot Ambon		

Sumber: Data diolah, 2021 www.bpk.go.id

Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian mengalami penurunan pada tahun 2020. Laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Tidak Memberi Pendapat dan Tidak Wajar yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup. Permasalahan yang dijumpai oleh BPK dalam LKPD tahun 2020, antara lain:

1. Permasalahan penyajian akun aset lancar
2. Permasalahan penyajian akun aset tetap
3. Permasalahan penyajian akun aset lainnya
4. Permasalahan penyajian akun belanja operasi
5. Permasalahan penyajian akun belanja modal

Adapun catatan/review dan hasil evaluasi yang menjadi ketertarikan penelitian dari auditor inspektorat mengenai laporan keuangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020, antara lain:

1. Koreksi kesalahan pencatatan dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Pembangunan Bangunan Gedung Pengadaan Interior Aula BKPSDM;
2. Koreksi kesalahan pencatatan dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) berupa Pembangunan TPT Taman Pasanggrahan;
3. Koreksi kesalahan pencatatan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Persediaan;
4. Koreksi pencatatan ganda pada akun aset;
5. Pencatatan koreksi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Peralatan dan Mesin (KIB B) berupa Pembangunan bangunan gedung pengadaan Interior Aula BKPSDM;
6. Koreksi pencatatan Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Persediaan.

Berdasarkan sumber dari sukabumiupdate.com yang di catat oleh FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran) yaitu kesalahan berulang pada pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sukabumi, dua indikatornya pengelolaan keuangan yang kurang profesional, dan minimnya publikasi laporan kinerja serta akuntabilitas intansi pemerintah antara lain:

1. Tidak tertib dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan ketersediaan, tercermin ditemukannya kembali permasalahan yang sama yakni terdapat 7 organisasi perangkat daerah (OPD) dan 26 kecamatan yang tidak menyampaikan laporan penatausahaan persediaan secara rutin setiap bulannya hal serupa terjadi pada tahun 2016.
2. Pemkab Sukabumi tidak tertib dalam penatausahaan piutang pajak daerah non pajak bumi dan bangunan, sesuai data rincian piutang pajak daerah non PBB dan BPHTB diketahui tahun 2017 terdapat 3.187 ketetapan dengan nilai sebesar 1.682.587.074,40 rupiah yang belum diterima pembayarannya di kas daerah.
3. Bagian perekonomian sekretariat daerah belum menatausahakan dana bergulir secara memadai.
4. Pemkab Sukabumi tidak tertib dalam penatausahaan barang milik negara, tercermin dalam masalah pokok perhitungan kapitalisasi aset tetap yang tidak sesuai ketentuan dan pencatatan data kendaraan dalam kartu inventarisir barang (KIB) belum memadai.
5. Melakukan kesalahan penganggaran belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa sebesar 4.355.763.000 rupiah.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh beberapa pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Hal ini diperburuk karena anggaran yang dikelola merupakan anggaran publik dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Di

lain pihak keadaan seperti ini merupakan suatu tugas dan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Harken (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal (X2), sehingga hipotesis pertama diterima. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y), sehingga hipotesis kedua diterima. sistem pengendalian intern (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Berdasarkan penelitian tersebut skripsi ini mengangkat judul “**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**” (**Penelitian pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi**) untuk menguji kembali apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman kabupaten Sukabumi?

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi?
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan Penelitian ini Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.

3. Menguji dan membuktikan Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara struktur akuntansi, domain publik antara lain meliputi pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya.

Hantono dan Rahmi (2018) akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapuhan, ketelitian, dan kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut. Menurut Susanto & Halim (2018) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

Menurut Anik, Dewi dan Ayu (2020) akuntansi pemerintah daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah. Sedangkan menurut Ratmono (2015) akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

Menurut Salam dan Sutaryo (2019) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dari definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan.

2.1.1 Karakteristik Organisasi Pemerintahan

Menurut Anik, Dewi dan Ayu (2020) karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Tujuan Organisasi

Organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba melainkan pemberian pelayanan publik

(*public service*). Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pelayanan publik bukan berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD) dan juga upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor publik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, *charging for services*, laba perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, dan obligasi pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Pola Pertanggungjawaban

Pada organisasi sektor publik, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi sedangkan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi sangat terpengaruh pada politik seperti tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik.

5. Karakteristik Anggaran

Pada organisasi sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan lagi sebagai rahasia negara.

6. Sistem Akuntansi

Organisasi sektor publik menggunakan sistem *cash toward to accrual* artinya ada beberapa akun yang diperlakukan dengan basis kas ada juga sebagian akun yang diperlakukan dengan basis akrual. Namun pada tahun 2015 semua organisasi sektor publik harus sudah menggunakan basis akrual.

2.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nabila (2021) berdasarkan fungsinya akuntansi pemerintahan dikhususkan untuk lembaga negara yang mana tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat laporan laba (*income statement*) dan laporan akuntansi yang berkaitan dengan itu.
2. Akuntansi ini melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintah juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana.
4. Akuntansi pemerintah menggunakan perkiraan laba dan modal yang ditahan di neraca
5. Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku

2.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Nabila (2021) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang di mana akuntansi ini dibuat untuk sebagai berkas laporan peratnggungjawaban keuangan negara. Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan (kontrol)

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.2 Sistem Akuntansi

Sistem menurut Mulyadi (2017) adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu dari berbagai subsistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem tersebut juga bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari subsistem itu sendiri dan bagian dari sistem lain yang lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan.

Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/ instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/ instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/ instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Accounting principles board seperti yang diungkapkan dalam Halim (2017) bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Adanya kriteria bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah informasi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi wajib menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi.

Menurut Mulyadi (2017) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Nuruniswah (2019) Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan manajemen. Penyusunan laporan keuangan yang baik akan menghasilkan pengelolaan manajemen yang baik pula.

2.2.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Definisi sistem akuntansi pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020, sistem akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari

prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan diatur dengan peraturan menteri akuntansi keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Catatan atas Laporan keuangan SKPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

1. Surat tanda bukti pembayaran;

2. STS;
 3. Bukti transfer; dan
 4. Nota kredit Bank.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

1. SP2D;
2. Nota debit Bank; dan
3. Bukti pengeluaran kas lainnya.

3. Prosedur Akuntansi Aset

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses akuntansi pemerintah daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan yang dilakukan secara elektronik. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis/nama aset tetap;
2. Kode rekening;
3. Klasifikasi aset tetap;
4. Nilai aset tetap; dan

5. Tanggal transaksi dan/atau kejadian.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan penggolongan dan peringkasan transaksi hingga pelaporan. dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Berita acara penerimaan barang;
2. Surat keputusan penghapusan barang;
3. Surat keputusan mutasi barang;
4. Berita acara pemusnahan barang;
5. Berita acara serah terima barang;
6. Berita acara penilaian; dan
7. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.2.2 Sistem dan Prosedur Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja.

Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah *menjurnal*. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar

akuntansi.

Dengan menggunakan *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran untuk masing-masing komponen..

Sedangkan prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dibagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja

Transaksi belanja di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal.

3. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti

memorial yang memuat informasi tentang jenis / nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.

5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang sejenis / nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.

6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pemda.

2.2.3 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi

Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Adapun beberapa basis / dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas

maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak dapat diterapkan lagi.

2. Basis Akrua

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas.

3. Basis Kas Modifikasian

Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrua Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

2.2.4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas bila dikaitkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam kandungan sistem akuntansi pemerintah daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai

adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya

Informasi yang relevan adalah:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan/ mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

3. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK (2020), Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas/laporan arus dana, dan catatan atas laporan keuangan materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus..

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak- pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas. Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee (IFAC-PSC)* dikelompokkan sebagai berikut:

1. Badan legislatif
Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang- undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.
2. Rakyat
Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.
3. Investor dan kreditor
Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditor pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmentnya.
4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain
Seperti para investor dan kreditor bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.
5. Analisis ekonomi dan keuangan
Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar

pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.

2.3.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Erniati (2015) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.3.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (CALK).

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos- pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan

dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.3.4. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Dalam kendala SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan adalah setiap keadaan dimana ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam informasi akuntansi dan keuangan pemerintah yaitu:

1. Materialitas

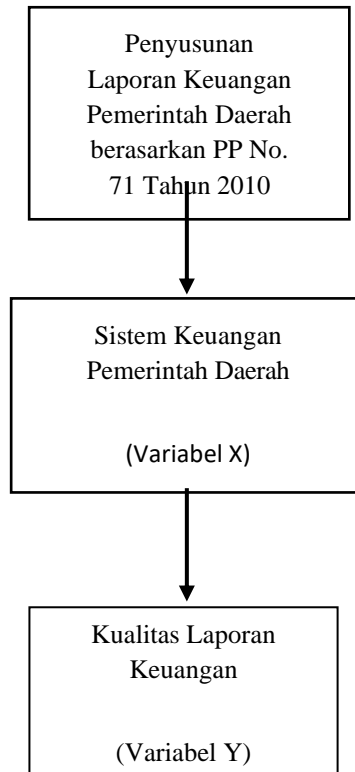
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan agar mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 Penelitian Sebelumnya Dan Rerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Harken Drama (2014) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)	<p>Independen:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,</p> <p>Intervening:</p> <p>2). Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Dependen:</p> <p>1). Kualitas Informasi Laporan Keuangan</p>	<p>Variabel indeviden:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah:</p> <p>a). Prosedur Akuntansi Penrimaan Kas</p> <p>b). Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas</p> <p>c). Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah</p> <p>d). Prosedur Akuntansi Selain Kas</p> <p>Variabel Intervening:</p> <p>1). Sistem Pengendalian Intern</p> <p>a). Lingkungan Pengendalian</p> <p>b). Penilaian Resiko</p> <p>c). Kegiatan Pengendalian</p> <p>d). Informasi Dan Komunikasi</p> <p>e). Pemantauan Pengendalian Intern</p> <p>Variabel Dependen:</p>	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolonearisitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji F Statistik, Uji Koefisien Determinasi, Dan Uji t Hitung	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern, sehingga hipotesis pertama diterima. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, sehingga hipotesis kedua diterima. sistem pengendalian

			<p>1). Kualitas Informasi Laporan Keuangan</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>		intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
2	<p>Arlia Sari Artana (2016) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Independen:</p> <p>1). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>2). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>3). Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Dependen:</p> <p>1). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>a). Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>b). Laporan Arus Kas</p> <p>c). Koreksi Surplus Defisit, Kesalahan Fundamental Dan Perubahan Kebijakan Akuntansi</p> <p>d). Kos Pinjaman</p> <p>e). Laporan Keuangan Konsolidasi dan Entitas Kendali</p> <p>2). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a). Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah Pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>b). Sistem Akuntansi Intansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>3). Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Multikolineritas, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Koefisien Determinan, Uji t, Dan Uji F</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>

			<p>a). Lingkungan Pengendalian</p> <p>b). Penilaian Resiko</p> <p>c). Prosedur Pengendalian</p> <p>d). Pemantauan</p> <p>e). Informasi Dan Komunikasi</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>		
3	Nurhayati Soleha (2014) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten	<p>Independen:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>2). Aktivitas Pengendalian</p> <p>Dependen:</p> <p>1). Akuntabilitas Keuangan</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a) Organisasi SAKD</p> <p>b). Dokumen Sumber Pembukuan</p> <p>c). Catatan</p> <p>d). Prosedur</p> <p>e). Laporan Keuangan</p> <p>2). Aktivitas Pengendalian</p> <p>a). Pemisahan Tugas Yang Memadai</p> <p>b). Otorisasi Yang Sesuai Dari Transaksi Dan Aktifitas</p>	Uji reliabilitas, Uji validitas, Asumsi Klasik, Uji Multikolineritas, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Koefisien Determinan, Uji t, Dan Uji F	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa

			<p>c). Dokumen Dan Catatan Yang Memadai</p> <p>d). Pengendalian Fisik Dan Catatan</p> <p>e). Pemeriksaan Independen Atas Kinerja</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1). Akuntabilitas Keuangan</p> <p>a). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan</p> <p>b) Penilaian Kinerja Keuangan</p> <p>c). Adanya Informasi Yang Handal</p> <p>d). Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinilai Secara Objektif Dan Independen</p> <p>e). Tindak Lanjut Terhadap Laporan</p>		<p>implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan.</p>
4	<p>Rahima Br Purba Dan Azima Mendina Amrul (2018) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Ktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan</p>	<p>Independen:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>2). Transparansi Publik</p> <p>3). Aktivitas Pengendalian</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a). Pengumpulan Data</p> <p>b). pencatatan</p> <p>c). Penggolongan</p> <p>d). Peringkasan</p> <p>2). Transparansi Publik</p> <p>a). Mengukur Tingkat Keterbukaan Proses</p>	<p>Uji Kualitasi Data, Uji Normalitas, Uji Multikineritas, Uji Heterokedastisitas, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji Koefisien Determinasi, Uji Validitas, Uji Realibilitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif secara parsial antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari nilai signifikan</p>

	Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	<p>Dependen:</p> <p>1). Akuntabilitas Keuangan</p>	<p>Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b). Seberapa Mudah Peraturan Dan Prosedur Pelayanan Dapat Dipahami Oleh Pengguna</p> <p>c). Kemudahan Memperoleh Informasi Mengenai Berbagai Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>3). Aktivitas Pengendalian</p> <p>a) Pemisahan Tugas/Fungsi/Wewenang Yang Cukup</p> <p>b). Otorisasi Yang Sesuai Dari Transaksi Dan Aktifitas lainnya</p> <p>c). Pengendalian Terhadap Pemrosesan Informasi</p> <p>d). Pengendalian Secara Fisik Terhadap Aset Dan Catatan</p> <p>e). Evaluasi Secara Independen Atas Kinerja</p> <p>f). Pembatasan Akses Terhadap Sumber Daya Dan Catatan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1). Akuntabilitas Keuangan</p> <p>a). Kejiban Seseorang/Lembaga Untuk Memberikan Laporan Yang</p>		<p>lebih dari 0,05. Sedangkan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan tidak terdapat pengaruh yang signifikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah didapatkan.</p>
--	---------------------------------------	---	---	--	--

			<p>Memuaskan Atas Tindakan Sebagai Akibat Wewenang Yang Dimiliki /Diterima</p> <p>b). Pengukuran Tanggung Jawab Yang Diexpresikan Dalam Nilai Uang, Unit Kekayaan Atau Dasar Lain Yang Ditentukan Sebelumnya</p> <p>c). Kewajiban Membuktikan Kinerja Yang Baik Sesuai Ketentuan</p>		
5	<p>Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh (2017)</p> <p>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p>	<p>Independen:</p> <p>1). Sistem Pengendalian Internal</p> <p>2). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Dependen:</p> <p>1). Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1). Sistem Pengendalian Internal</p> <p>a). Pengendalian Lingkungan</p> <p>b). Penilaian Resiko</p> <p>c). Kegiatan Pengendalian</p> <p>d). Informasi Dan Komunikasi</p> <p>e). Pemantauan Pengendalian Internal</p> <p>2). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a). Prosedur Akuntansi Penrimaan Kas</p> <p>b). Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas</p> <p>c). Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah</p>	<p>Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolonearisitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji F Statistik, Uji Koefisien Determinasi, Dan Uji t Hitung.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan penerpan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.</p>

			<p>d). Prosedur Akuntansi Selain Kas</p> <p>e). Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1). Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>		
6	<p>Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar (2012)</p> <p>Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh</p>	<p>Independen:</p> <p>1). Penerapan Good Governance</p> <p>2). Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>Dependen:</p> <p>1). Kualitas Informasi Keuangan Skpd</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1). Penerapan Good Governance</p> <p>a). State</p> <p>b). Private Sector</p> <p>c). Society</p> <p>2). Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>a). Keterbandingan Antar Laporan Keuangan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1). Kualitas Informasi Keuangan Skpd</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>	<p>Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji F Statistik, Uji Koefisien Determinasi, Uji Koefisien Korelasi Dan Uji t Hitung.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan</p>

					berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
7	<p>Teguh Erawati, Muhammad Firas Abdulhad (2018)</p> <p>Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)</p>	<p>Indevenden:</p> <p>1). Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>2). Kapasitas Sumber Daya Manusia</p> <p>3). Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Dependen:</p> <p>1). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Variabel <i>Indevenden:</i></p> <p>1). Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a). Prosedur Akuntansi Penrimaan Kas</p> <p>b). Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas</p> <p>c). Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah</p> <p>d). Prosedur Akuntansi Selain Kas</p> <p>2). Kapasitas Sumber Daya Manusia</p> <p>a). Pencapaian Tujuan</p> <p>b). Efektivitas</p> <p>c). Efisiensi Kinerja</p> <p>3). Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>a). Teknologi Komputer</p> <p>b). Teknologi Informasi</p> <p>Variabel <i>Dependen:</i></p>	<p>Uji Kualitasi Data, Uji Normalitas, Uji Multikineritas, Uji Heterokedastisitas, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji Koefisien Determinasi, Uji Validitas, Uji Realibilitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1. Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 3. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan</p>

			<p>1). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>		<p>pemerintah daerah. 4. Pemahaman sistem akuntansi, kapasiata sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
8	<p>Putriasri Pujanira Dan Abdullah Taman (2017)</p> <p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY</p>	<p><i>Independen:</i></p> <p>1). Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>2). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>3). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p><i>Dependen:</i></p> <p>1). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Variabel <i>Independen:</i></p> <p>1). Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>a). Mengelola</p> <p>b). Menyajikan Informasi Keuangan</p> <p>2). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>a). Basis Akrual</p> <p>b). Keterbandingan Antar Laporan Keuangan</p> <p>3). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a). Prosedur Akuntansi Penrimaan Kas</p>	<p>Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji Hipotesi, Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F, Regresi Linier Berganda.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa:: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan $t_{hitung} = 8,049$ dan $r_{2x1y} = 0,388$, (2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif ter</p>

			<p>b). Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas</p> <p>c). Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah</p> <p>d). Prosedur Akuntansi Selain Kas</p> <p>Variabel <i>Dependen</i>:</p> <p>1). Kualitas</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>		<p>hadap Kualitas</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan t hitung = 6,071 dan</p> <p>$r_{2 \times 2y} = 0,265,$</p> <p>(3) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan t hitung = 5,949 dan</p> <p>$r_{2 \times 3y} = 0,258,$</p> <p>(4) Kompetensi</p> <p>Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi</p>
--	--	--	--	--	---

					Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY ditunjukkan dengan persamaan regresi, $F_{hitung} = 23,133$ dan $R^2_{y(1,2,3)} = 0,410$.
9	Siska Yulia Defitri (2018) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Independen:</i> 1). Pengelolaan Keuangan Daerah 2). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <i>Dependen:</i> 1). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel <i>Independen:</i> 1). Pengelolaan Keuangan Daerah a). Akuntabilitas b). Value for money c). Kejujuran dalam mengelola keuangan publik d). Transparansi e). Pengendalian 2). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah a). Pencatatan b). Penggolongan dan pengikhtisaran c). Pelaporan	Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji Hipotesi, Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F, Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara

			<p>Variabel <i>Dependen</i>:</p> <p>1). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>a). Relevan</p> <p>b). Andal</p> <p>c). Dapat Dipahami</p> <p>d). Dapat Dibandingkan</p>		<p>signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.</p>
10	<p>Vicky Dzaky Cahaya Putra Dan Romli (2020)</p> <p>Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dan <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung</p>	<p><i>Independen</i>:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>2). <i>Good Government Governance</i></p> <p><i>Dependen</i>:</p> <p>1). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Variabel <i>Independen</i>:</p> <p>1). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>a). Pencatatan</p> <p>b). Pengikhtisaran</p> <p>c). Pelaporan</p> <p>2). <i>Good Government Governance</i></p> <p>a). Keterlibatan Masyarakat</p> <p>b). Kokohnya Supremasi Hukum</p> <p>c). Keterbukaan</p> <p>d). Perhatian pada Stakeholder</p> <p>e). Berorientasi pada Kesepakatan</p> <p>f). Keseragaman</p>	<p>Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji F Statistik, Uji Koefisien Determinasi, Dan Uji t Hitung.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1. Secara simultan adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan <i>Good Government Governance</i> terhadap kualitas informasi laporan keuangan 2. Secara parsial adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan</p>

			g). Memiliki Manfaat h). Tanggung jawab i). Rencana Strategis Variabel <i>Dependen</i> : 1). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah a). Dapat Dimengerti b). Memiliki Keterkaitan c). Kemahiran d). Dapat Disamakan e). Objektif f). Tepat Sesuai waktu g) Tersusun Lengkap		daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan 3. Secara parsial adanya pengaruh Good Government Governance terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
--	--	--	---	--	--

Sumber: Jurnal dan skripsi, 2021

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Harken (2014), Nurhayati (2014), Rahima dan Mendina (2018), Novtania, Linda, Winston (2017), Erawati dan Abdulhad (2018), Pujanira dan Taman (2017), Defitri (2017), Putra dan Romli (2020) berupa variabel independen yaitu menggunakan proksi sistem akuntansi keuangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Arlia (2016), Novtania, Linda, Winston (2017), Azlim, Darwanis, Bakar (2012), Erawati dan Abdulhad (2018), Pujanira dan Taman (2017), Defitri (2017), Putra dan Romli (2020) berupa variabel dependen menggunakan proksi kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Harken (2014) berupa lokasi penelitian dan menggunakan proksi sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening. Dengan penelitian Arlia (2016) berupa lokasi dan variabel independen yang digunakan peneliti. Dengan penelitian Nurhayati (2014) berupa lokasi penelitian dan variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan dan menggunakan proksi aktivitas pengendalian sebagai variabel independen kedua. Dengan penelitian Rahima dan Mendina (2018) berupa lokasi penelitian, variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan dan menggunakan proksi transparansi publik sebagai variabel independen kedua dan menggunakan proksi aktivitas pengendalian sebagai variabel independen ketiga. Dengan penelitian Novtania, Linda, Winston (2017) berupa lokasi penelitian dan menggunakan proksi sistem pengendalian intern sebagai variabel independen pertama. Dengan penelitian Azlim, Darwanis, Bakar (2012) berupa lokasi dan variabel

independen. Dengan penelitian Erawati dan Abdulhad (2018) berupa lokasi penelitian dan menggunakan beberapa variabel independen lain. Dengan penelitian Pujanira dan Taman (2017) berupa lokasi penelitian dan menggunakan beberapa variabel independen lain. Dengan penelitian Defitri (2017) berupa lokasi penelitian dan menggunakan beberapa variabel independen lain. Dengan penelitian Putra dan Romli (2020) lokasi penelitian dan menggunakan beberapa variabel independen lain.

2.4.2. Rerangka Pemikiran

Sebagaimana sektor swasta pemerintah merupakan sektor publik yang membutuhkan akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintah maupun sebagai penyedia informasi keuangan yang berkaitan. Secara organisasi, domain publik, antara lain meliputi Badan Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan terkait dengan perusahaan biasa disebut akuntansi bisnis, sedangkan yang terkait dengan usaha nonprofit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Maka dari itu pemerintah daerah merupakan organisasi nonprofit, jadi akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah yakni akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.

Menurut Halim (2017) proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara/ metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah daerah melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Peraturan menteri dalam negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, setiap sistem keuangan pemerintah daerah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut secara periodik yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan kerja perangkat dinas.
2. Neraca Satuan kerja perangkat dinas.
3. Catatan atas Laporan keuangan Satuan kerja perangkat dinas.

Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Dinas, sedangkan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD-SKPKD). Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang milik Daerah; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Berkaitan dengan peraturan menteri dalam negeri dapat disimpulkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan pemerintah ditunjukkan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya (Peraturan Pemerintah, No.71 Tahun 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan teori tersebut menerangkan bahwa kualitas laporan keuangan ialah suatu tolak ukur dari pelaporan informasi akuntansi yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan awal yang diinginkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan ada beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintahan yang baik, juga dapat menunjang kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Setiap informasi yang baik dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi 4 syarat sesuai dengan prasyarat normatif yaitu:

1. Relevan
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa yang lampau. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

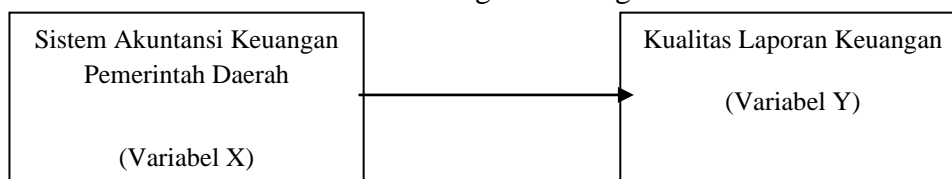
Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan :

1. Relevan berarti informasi keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi terdahulu
2. Andal berarti informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bebas dari salah saji material dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Dapat dibandingkan berarti informasi keuangan yang di sajikan di periode sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau acuan untuk periode selanjutnya apakah memperbaiki yang buruk maupun yang baik.
4. Dapat dipahami berarti informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami disesuaikan dengan kalangan pengguna yang akan menggunakan informasi keuangan tersebut.

Dari teori-teori di atas bahwa pemerintah daerah dalam membuat dan melaporkan informasi keuangan daerahnya mengacu pada suatu sistem pemerintahan

standar akuntansi pemerintahan yang mengatur berbagai pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan output yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami oleh berbagai kalangan.

Gambar 2.2 Paradigma Rerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Ha: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Explanatory Survey*. Penelitian *explanatory* analisis dengan pendekatan survey adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data. Sehingga dapat memberikan gambaran keadaan yang terjadi secara nyata untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian yang akan diteliti penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai variabel independen serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

3.2.2. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis peneliti tidak melakukan penelitian kepada semua karyawan yang berada di Dinas Perumahan Dan Pemukiman. Namun, peneliti hanya mengambil sampel pada karyawan atau staff yang berada di bagian akuntansi atau keuangan saja. Hal itu dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada sistem akuntansi keuangan yang digunakan tentunya oleh bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Perumahan Dan Pemukiman tersebut.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis seperti organisasi/perusahaan/instansi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis adalah instansi pemerintahan Dinas Perumahan Dan Pemukiman

Kabupaten Sukabumi.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, berupa gambaran mengenai objek penelitian, memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer, data primer adalah sumber data yang di dapatkan langsung kepada pengumpul data.

Jenis dan sumber data yang dipilih adalah berkaitan dengan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis sehingga akan mendapatkan data secara langsung dan didapatkan data primer. Data primer sebagai jenis dan sumber data penelitian.

3.4 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2018) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.

3.4.2 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2018) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.

Penjabaran variabel ke dalam indikator-indikator yang akan mendasari penyusunan kuesioner dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasional Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel	Indiakor	Skala Pengukuran	Nomor Kuesioner
Variabel Independen Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X)	1. Kesesuain sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Ordinal	1
	2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya		2 s/d 6
	3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik		7 s/d 10
Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Relevan	Ordinal	1-2
	2. Andal		3 s/d 7
	3. Dapat dibandingkan		8-9
	4. Dapat dipahami		10-11

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data–data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah *Summated Rating Method: Likert Scale* atau skala likert. Skala likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala ordinal. Alasan penggunaan teknik pengukuran skala likert adalah karena teknik ini tidak menuntut penggunaan kategori dan subjek yang di ukur tidak terbatas kepada dua alternatif jawaban saja.

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban–jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban, sebagai

berikut :

- Skor 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
- Skor 3 untuk jawaban Setuju (S)
- Skor 2 untuk jawaban Tidak setuju (TS)
- Skor 1 untuk jawaban Sangat tidak setuju (STS)

3.5 Metode Penarikan Sampel

Definisi sampel menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik non probability sampling. Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang benar-benar dapat mewakili (representative) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Tidak semua daerah atau kelompok populasi diteliti, cukup dua atau tiga daerah kelompok yang diambil sampelnya untuk diteliti.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Responden yang merupakan karyawan atau staaf di bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi tersebut pada dinas yang bersangkutan. Angket yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kalau dalam obyek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna putih maka hasil penelitian tidak valid. Dengan demikian data yang valid adalah (data yang tidak berbeda) antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada objek penelitian

Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan Rumus Koefisien Korelasi *Product Moments Pearson* sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden
- Y = Jumlah skor total seluruh item Y_i
- X = Jumlah skor tiap item X_i

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai t_{hitung} untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden

Setelah nilai t_{hitung} diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t_{hitung} tersebut dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$. Kaidah keputusannya adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah. Uji validitas terhadap item-item pernyataan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data *software* SPSS Ver 22.

Namun dalam penelitian ini skala pengukuran untuk uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} atau nilai yang dihasilkan pada uji reabilitas yaitu pada kolom Correlation Item-Total Correlation dengan nilai yang dihasilkan r_{tabel} . Berdasarkan perbandingan antara r_{hitung} dan r_{tabel} maka terbentuklah hipotesis, sebagai berikut :

- Ho : $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada kuisisioner dinyatakan valid.
- Ha : $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan pada kuisisioner dinyatakan tidak valid.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018) instrument yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data

yang sama. Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini digunakan Koefisien *Alpha Cronbach*. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian Koefisien *Alpha Cronbach* ditunjukkan dengan:

$$\text{Alpha}(\alpha) = \frac{k \cdot r}{1 + (k - 1)r}$$

Keterangan :

k = Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten

r = Rata-rata korelasi antar variabel manifes

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi jawaban.

- Jika $r < 0,20$ maka tingkat keandalan sangat lemah atau tingkat keandalan tidak berarti.
- Jika r diantara $0,20 - 0,40$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang rendah tetapi pasti.
- Jika r diantara $0,40 - 0,70$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang cukup berarti.
- Jika r diantara $0,70 - 0,90$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang tinggi.
- Jika $r > 0,90$ maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi.

Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah. Uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data *software SPSS Ver 22*.

3.7.3. Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$r_s = \frac{1 - 6 \sum d_1^2}{n^3 - n}$$

Dengan ketentuan:

r_s = koefisien korelasi *Rank Spearman*

d_i = selisih *rank* X dengan *rank* Y yang ke-1

n = jumlah sampel

6 = Besaran sampel (konstanta)

Nilai r_s (koefisien korelasi *rank spearman*) yang diperoleh akan berkisar antara 1,0 sampai +1. Notasi ini menunjukkan tingkat korelasi antara variabel- variabel yang diuji, yaitu:

- 1) Bila $r_s = -1$ berarti terdapat korelasi yang kuat tetapi merupakan korelasi negatif atau berlawanan arah (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya)
- 2) Bila $r_s = 0$ berarti terdapat korelasi antara variabel-variabel yang diuji atau korelasi yang lemah dan tidak ada hubungan.
- 3) Bila $r_s = 1$ berarti terdapat korelasi yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan nilai positif atau searah (jika X naik maka Y naik atau sebaliknya).

Jika dalam perhitungan hubungan terdapat dua subjek atau lebih yang mendapatkan skor pada variabel yang sama, masing-masing akan mendapatkan rata-rata rangking sehingga terdapat rangking kembar. Jika proporsi rangking kembar yang terjadi tidak besar, maka akibatnya pada r , dapat diabaikan. Tetapi apabila proporsi rangking kembar yang terjadi cukup besar, maka dalam perhitungan korelasi adalah sebagai berikut :

$$T = \frac{t^2 - t}{12}$$

Keterangan : t = Jumlah data variabel yang memilih rank yang sama

Besarnya r menunjukkan jumlah variasi nilai T dari semua kelompok nilai kembar, sehingga perhitungan hubungan korelasi r , menjadi :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum X^2 \cdot \sum Y^2}}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\sum X^2 = \frac{n^2 - n}{12} - \sum T_x$$

\

$$\sum X^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

Keterangan :

r_s = Koefisien korelasi Rank Spearman

d_i = Selisih Rank x dan Rank y

n = Jumlah sampel

T_x = Faktor korelasi x

T_y = Faktor korelasi y

Analisis kuat lemahnya koefisien korelasi ini menurut Sugiyono (2018), dapat digunakan sebagai pedoman seperti yang tertera pada tabel; 3.2:

TABEL 3.2 Koefisien Korelasi dan Taksiran

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20- 0,399	Rendah
0,40- 0,599	Sedang
0,60- 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2018)

3.7.4. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya dari pengaruh variabel bebas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Kd = r_s^2 \times 100\%$$

keterangan:

Kd = koefisien determinasi

r_s = Koefisien korelasi *Rank Spearman*

3.7.5. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

Ho : $r_s \leq 0$ menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : $r_s > 0$ menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis ini menggunakan model statistik uji t, dengan rumus sebagai berikut :

$$t = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

Dimana:

r_s = koefisien korelasi spearman

n = Banyaknya sampel

Dengan ketentuan :

$\alpha = 0,05$

$Df = n (k+1)$

Dimana :

n = Jumlah data responden

k = Variabel independent

1 = Variabel dependent

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} yang terdapat dalam tabel distribusi t atau lazim disebut t_{tabel} . Adapun taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n-2$. Ketentuan penerimaan atau penolakan pernyataan, yaitu :

- 1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2021 yang bersumber dari data primer dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Yang menjadi sampel dipilih menggunakan non probability sampling sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Sukabumi

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi yaitu dengan adanya perubahan di Kementerian di atasnya yang berimbas pada perubahan yang signifikan pada perangkat daerah perangkat yang ada dibawahnya terutama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya bernama Dinas Cipta Karya berubah mulai tahun 2015-2016 menjadi dinas Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan ciptakarya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata ruang, perumahan, permukiman, bangunan, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman ;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang teknik umum; tata ruang; perumahan, permukiman dan bangunan; kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis usaha jasa konstruksi;
6. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi teknis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
7. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
8. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; dan
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dimana dinas baru tersebut membidangi, 4 Bidang Yaitu :

1. Bidang Tata Ruang
2. Permukiman dan Bangunan
3. Kebersihandan Pertamanan
4. Teknik Umum

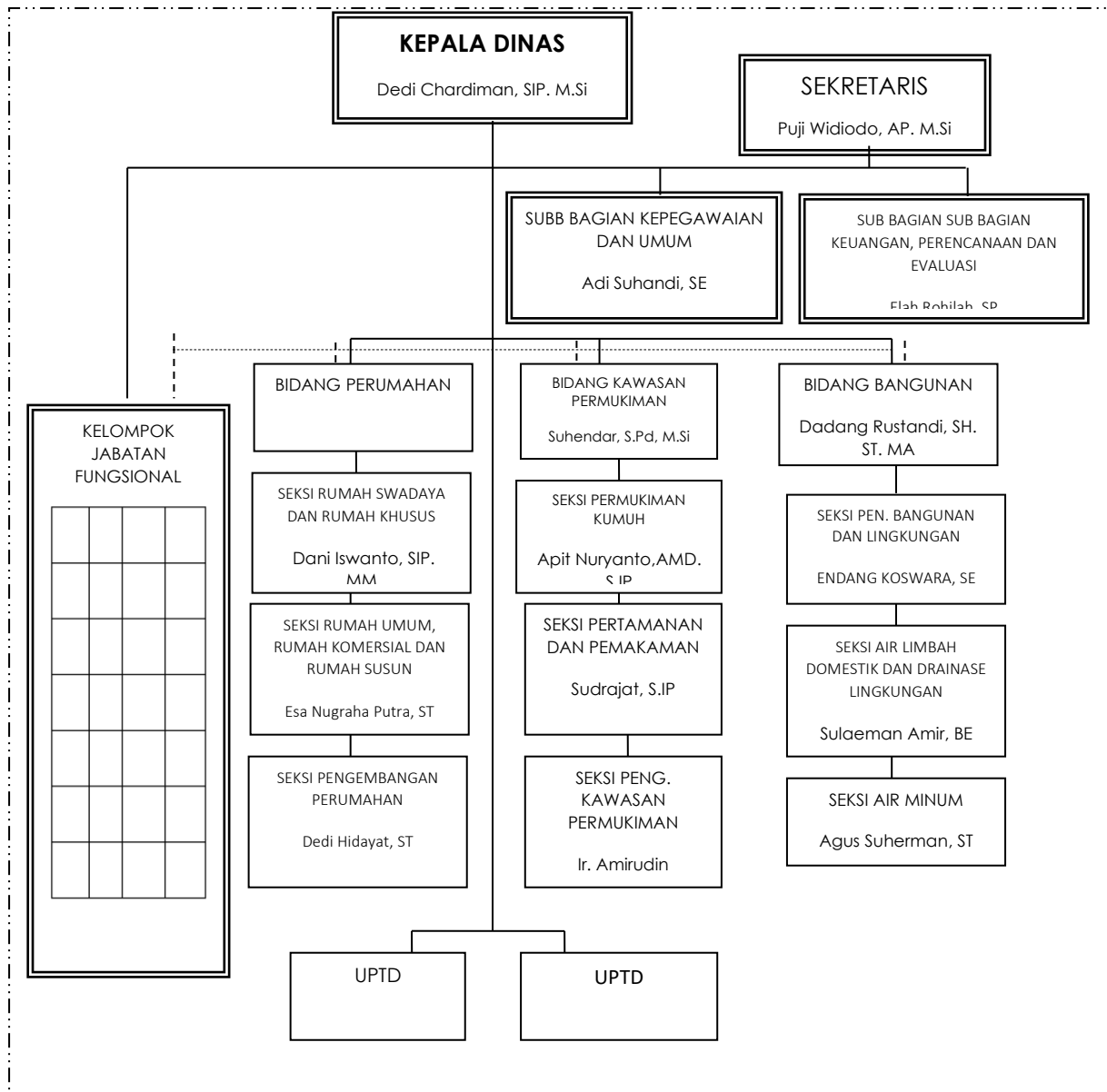
Seiringnya berjalanya waktu yang dimana ada perubahan sotk yang baru dan hal tersebut dapat merubah sotk yang lama sehingga pada tahun 2017-2018 nama Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan berubah lagi menjadi dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, dimana perkimsi ini membawahi :

1. Bidang Perumahan
2. Bidang Kawasan Permukiman
3. Bidang Bangunan
4. Bidang kebersihan

Dan Bidang Tata Ruang berpindah ke dinas pertanahan. Tidak cukup sampai disana dinas perkimsih bertransformasi dengan kebijakan yang ada diatasnya yaitu dari kementerian perumahan rakyat yang mengakibatkan perubahan kembali nomenklatur dan sotk maka pada tahun 2019 dinas perkimsih berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan membawahi Bidang-bidang diantaranya :

1. Bidang Perumahan
2. Bidang Kawasan Permukiman; dan
3. Bidang Bangunan

4.1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang



Sumber: Dinas Perumahan dan Peukiman Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2021

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Bangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Kesekretariatan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan umum, keuangan, monitoring dan evaluasi;
3. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
4. pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
5. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
6. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
7. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
8. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
9. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
10. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
11. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
14. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Perumahan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan, pengembangan dan pengelolaan sanitasi. Bidang perumahan terdiri dari:

1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus;
2. Seksi Rumah Umum, Rumah Komersial dan Rumah Susun; dan
3. Seksi Pengembangan Perumahan.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perumahan;
2. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang rumah swadaya dan rumah khusus, bidang rumah umum, rumah komersial dan rumah susun dan bidang pengembangan perumahan;
3. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rumah swadaya dan rumah khusus, bidang rumah umum, rumah komersial dan rumah susun dan bidang pengembangan perumahan;
4. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang rumah swadaya dan rumah khusus, bidang rumah umum, rumah komersial dan rumah susun dan bidang pengembangan perumahan;

5. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang rumah swadaya dan rumah khusus; bidang perumahan umum, komersial dan rumah susun dan bidang pengembangan perumahan;
6. pengkoordinasian penyediaan dan rehabilitasi korban bencana;
7. pengkoordinasian fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
8. pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan;
9. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
10. pengkoordinasian pembangunan, pengawasan dan pengendalian PSU perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
13. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas dan fungsinya; dan
14. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

4. Bidang Kawasan Permukiman

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengawauan pengembangan kawasan permukiman. Bidang kawasan permukiman terdiri dari:

1. Seksi Permukiman Kumuh;
2. Seksi Pertamanan dan Permakaman; dan;
3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang permukiman kumuh; bidang pertamanan dan permakaman dan bidang pengembangan kawasan permukiman;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang permukiman kumuh; bidang pertamanan dan permakaman dan bidang pengembangan kawasan permukiman;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang permukiman kumuh; bidang pertamanan dan permakaman dan bidang pengembangan kawasan permukiman;
5. pengkajian bahan penerbitan izin atau rekomendasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengkoordinasian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;

7. pengkoordinasian pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
8. pengkoordinasian pembangunan, pengawasan dan pengendalian PSU skala kawasan permukiman;
9. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

5. Bidang Bangunan

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan dibidang tata bangunan melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan dibidang tata bangunan. Bidang bangunan terdiri dari:

1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
2. Seksi Air Limbah Domestik dan Drainase lingkungan; dan
3. Seksi Air Minum

Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bangunan;
2. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan; bidang air limbah domestik dan drainase lingkungan; dan bidang air minum;
3. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penataan bangunan dan lingkungan; bidang air limbah domestik dan drainase Lingkungan; dan bidang air minum;
4. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan; bidang air limbah domestik dan drainase lingkungan; dan bidang air minum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan bangunan gedung di daerah;
6. pengkajian bahan penerbitan izin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan izin usaha jasa konstruksi bangunan;
7. pengkoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
8. pengkoordinasian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
9. pengkoordinasian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
10. pengkoordinasian penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman;
11. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

13. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
14. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Deskripsi Profil Responden

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada pada bagian keuangan atau akuntansi di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden.

Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Responden dan Hasil Penyebaran Kuisisioner

Nama Intansi Pemerintah	Kuisisioner yang Disebar	Kuisisioner yang Kembali	Kuisisioner yang Dapat Diolah
Dinas Perumahan dan Pemukiman	30	30	30

Sumber: data primer yang telah diolah

Tabel 4.2 Kelompok Responden Berdasarkan Masa Bekerja

Masa Bekerja	Frekuensi	Presentase
1-10Tahun	13	43%
11-20Tahun	16	54%
21-30Tahun	1	3%
>30Tahun	0	0%
Total	30	100%

Sumber: data primer yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa masa bekerja 11-20 tahun merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu sebesar 54% sedangkan terendah yaitu yang masa bekerja 21-30 tahun yaitu 3%.

Tabel 4.3 Kelompok Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
SMA	3	10%
DIII	2	7%
S1	25	83%
S2	0	0%
Total	30	100%

Sumber: data primer yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir S1 merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu sebesar 83% sedangkan terendah yaitu yang pendidikan terakhir DIII yaitu 7%.

Tabel 4.4 Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	7	23%
Wanita	23	77%
Total	30	100%

Sumber: data primer yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa responden Jenis Kelamin wanita lebih besar yaitu 77% dibandingkan dengan pria yang hanya sebesar 23%.

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	Frekuensi	Persentase
20 – 30	13	43%
31 – 40	7	23%
41 – 50	8	27%
>50	2	7%
Total	30	100%

Sumber : data primer yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 dari 30 responden yang menjadi objek penelitian, terlihat responden dengan jenjang usia 20-30 tahun lebih banyak yaitu 43% sedangkan jenjang usia paling sedikit adalah >50 tahun yaitu 7%.

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terdiri dari 10 butir pertanyaan dari 3 indikator yaitu kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya, pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

1. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 Gambaran Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Item Pernyataan		Alternatif Jawaban				Skor Akrua	Skor Ideal	%	Rata-Rata
		Ss	S	Ts	Sts				
Pernyataan 1	F	16	14			106	120	88,3	3,53
	%	53,3	46,7						
Akumulasi Jawaban						106	120	88,3	3,53

Sumber: data primer yang telah diolah

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran, maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut:

Jarak interval untuk 30 orang responden

Nilai Indeks Minimum = Skor Minimum

= 1

Nilai Indeks Maksimum = Skor Maksimum

= 4

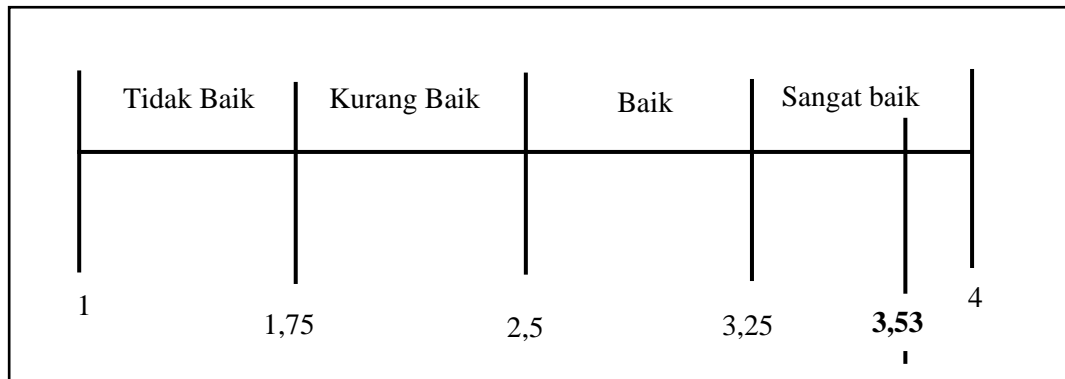
Interval = Nilai Indeks Maksimum – Nilai Indeks Minimum

= 4 – 1 = 3

Jarak Interval = Interval : Jenjang (4)

= 3 : 4 = 0,75

Dengan jarak interval sebesar 0,75 pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total tanggapan responden dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 4.1 Garis Kontinum Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari pernyataan 1 diperoleh total skor aktual 106 dan total skor ideal 120 dengan persentase 88,3% dan rata-rata skor sebesar 3,53. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

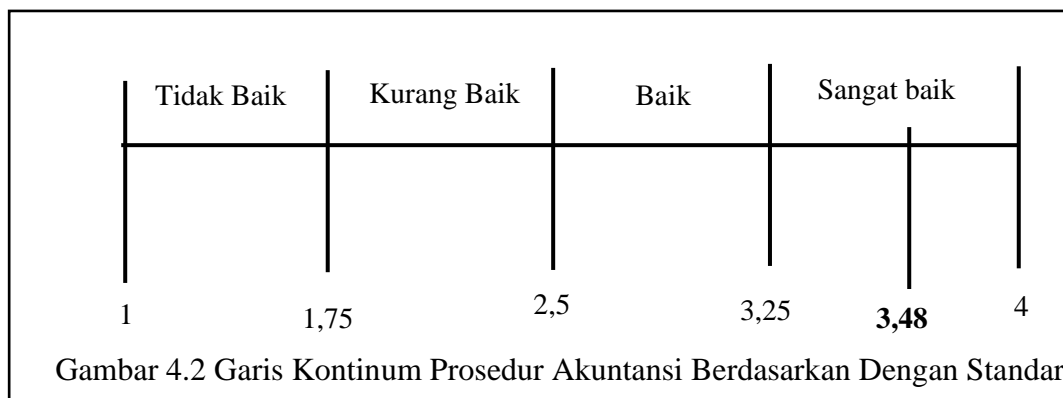
2. Prosedur akuntansi berdasarkan dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Prosedur Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi yang Berlaku Umum

Item Pernyataan		Alternatif Jawaban				Skor Akrua	Skor Ideal	%	Rata-Rata
		Ss	S	Ts	Sts				
Pertanyaan 2	F	12	18			102	120	85	3,4
	%	40	60						
Pertanyaan 3	F	14	12	4		100	120	83,3	3,3
	%	46,7	40	13,3					
Pertanyaan 4	F	20	10			110	120	91,7	3,7
	%	66,7	33,3						
Pertanyaan 5	F	14	14	2		102	120	85	3,4
	%	46,7	46,7	6,6					
Pertanyaan 6	F	19	11			109	120	90,8	3,63
	%	63,3	36,7						
Akumulasi Jawaban		79	65	6		523	600	87,1	3,48

Sumber: Data primer yang telah diolah



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum dari 5 pertanyaan diperoleh total skor akrua 523 dan total skor ideal 600 dengan persentase 87,1% dan rata-rata skor sebesar 3,48. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

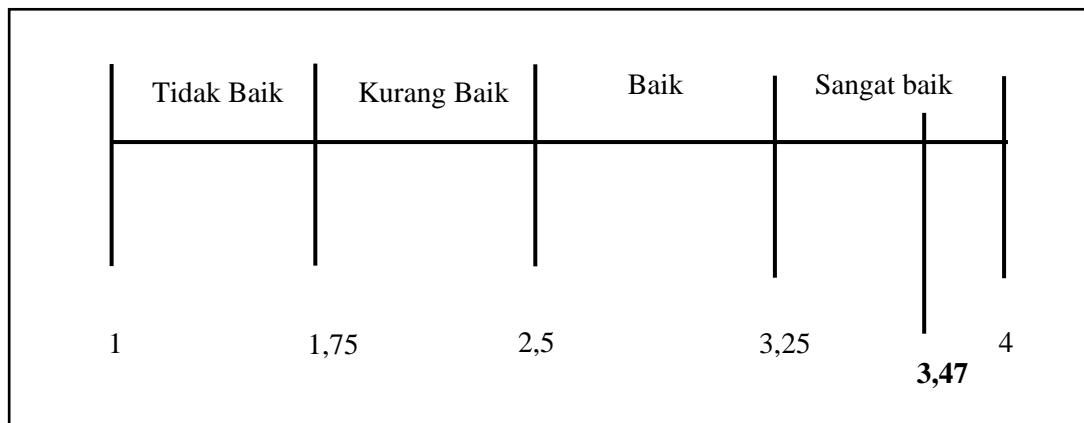
3. Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8 Gambaran Mengenai Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik

Item Pernyataan		Alternatif Jawaban				Skor Akrua	Skor Ideal	%	Rata-Rata
		Ss	S	Ts	Sts				
Pertanyaan 7	F	17	13			107	120	89,17	3,57
	%	56,7	43,3						
Pertanyaan 8	F	11	19			101	120	84,17	3,37
	%	36,7	63,3						
Pertanyaan 9	F	12	18			102	120	85	3,4
	%	40	60						
Pertanyaan 10	F	17	13			107	120	89,17	3,57
	%	56,7	43,3						
Akumulasi Jawaban		57	63			417	480	86,87	3,47

Sumber: Data primer yang telah diolah penulis



Gambar 4.3 Garis Kontinum Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik

Berdasarkan tabel dan Gambar di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik dari 4 pertanyaan diperoleh total skor akrua 417 dan total skor ideal 480 dengan persentase 86,87% dan rata-rata skor sebesar 3,47. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik

dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan laporan keuangan di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah sesuai dan dilakukan secara periodik.

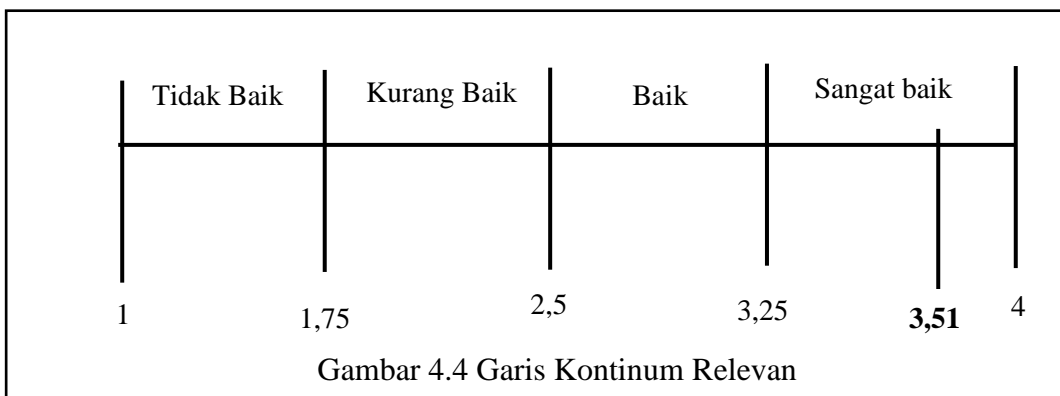
4. Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah terdiri dari 11 butir pertanyaan dari 1 indikator yaitu laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi kriteria dari sebuah laporan keuangan yang kualitatif dengan karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai laporan keuangan harus andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Relevan

Tabel 4.9 Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Relevan

Item Pernyataan		Alternatif Jawaban				Skor Akrua	Skor Ideal	%	Rata-Rata
		Ss	S	Ts	Sts				
Pertanyaan 1	F	16	14			106	120	88,3	3,53
	%	53,3	46,7						
Pertanyaan 2	F	15	15			105	120	87,5	3,5
	%	50	50						
Akumulasi Jawaban		31	29			211	240	87,9	3,51



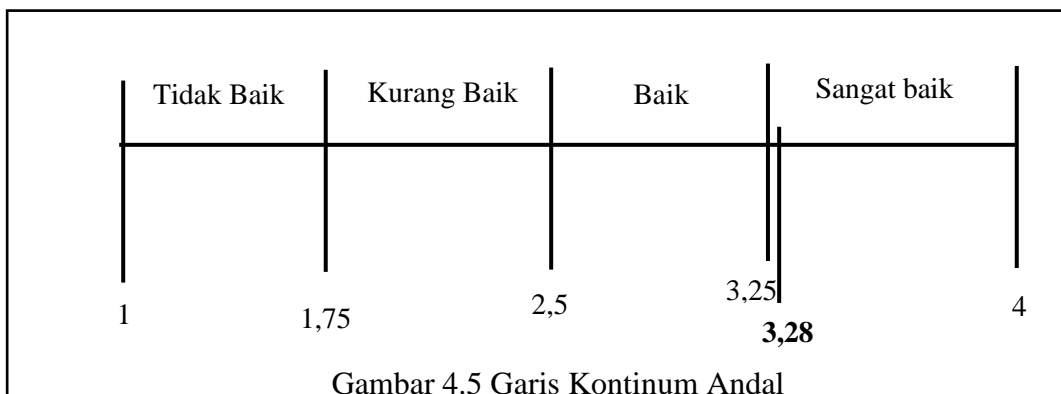
Berdasarkan tabel dan Gambar di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang kualitas laporan keuangan yang relevan dari 2 pertanyaan diperoleh total skor akrua 211 dan total skor ideal 240 dengan persentase 87,9% dan rata-rata skor sebesar 3,51. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang laporan keuangan harus relevan adalah sangat baik. Jadi dapat

disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah memenuhi kriteria relevan.

2. Andal

Tabel 4.10 Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Andal

Pertanyaan 3	F	14	16			104	120	86,7	3,47
	%	46,7	53,3						
Pertanyaan 4	F	17	13			107	120	89,2	3,57
	%	56,7	43,3						
Pertanyaan 5	F	20	10			110	120	91,7	3,67
	%	66,7	33,3						
Pertanyaan 6	F	12	9	9		93	120	77,5	3,1
	%	40	30	30					
Pertanyaan 7	F	12	3	6	9	78	120	65	2,6
	%	40	10	20	30				
Akumulasi Jawaban		75	51	15	9	492	600	82	3,28

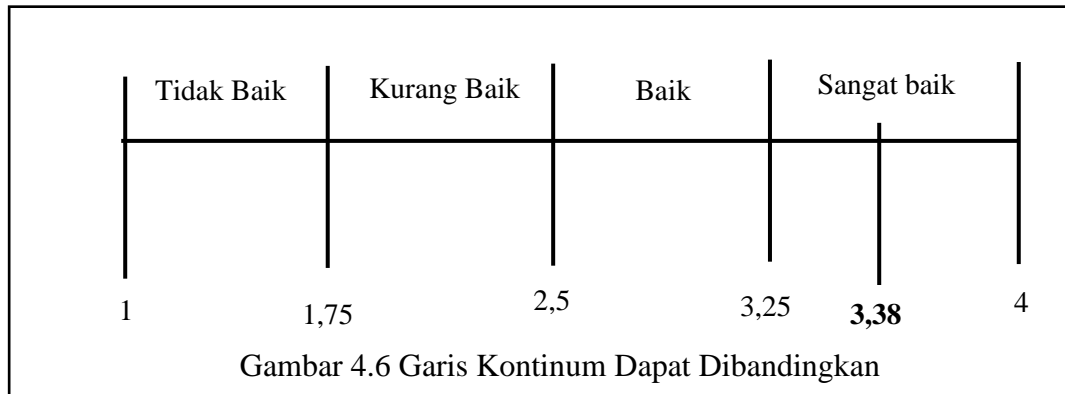


Berdasarkan tabel dan Gambar di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang kualitas laporan keuangan yang andal dari 5 pertanyaan diperoleh total skor akrual 492 dan total skor ideal 600 dengan persentase 82% dan rata-rata skor sebesar 3,28. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang laporan keuangan harus relevan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah memenuhi kriteria andal.

3. Dapat Dibandingkan

Tabel 4.11 Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Dapat Dibandingkan

Pertanyaan 8	F	10	20			100	120	83,3	3,3
	%	33,3	66,7						
Pertanyaan 9	F	14	15	1		103	120	85,8	3,43
	%	46,7	50	3,3					
Akumulasi Jawaban		24	35	1		203	240	84,5	3,38

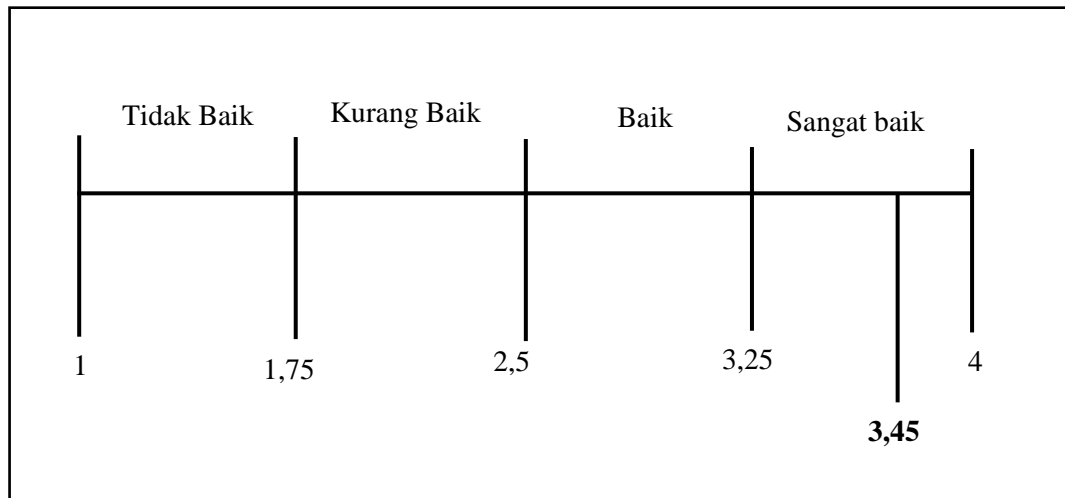


Berdasarkan tabel dan Gambar di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang kualitas laporan keuangan yang dapat dibandingkan dari 2 pertanyaan diperoleh total skor aktual 203 dan total skor ideal 240 dengan persentase 84,5% dan rata-rata skor sebesar 3,38. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang laporan keuangan harus dapat dibandingkan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah memenuhi kriteria dapat dibandingkan.

4. Dapat Dipahami

Tabel 4.12 Gambaran Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Dapat Dipahami

Pertanyaan 10	F	14	16			104	120	86,7	3,47
	%	46,7	53,3						
Pertanyaan 11	F	13	17			103	120	85,8	3,43
	%	43,3	56,7						
Akumulasi Jawaban		27	33			207	240	86,2	3,45



Gambar 4.7 Garis Kontinum Dapat Dipahami

Berdasarkan tabel dan garis di atas, jumlah skor total tanggapan responden tentang laporan keuangan harus dapat dipahami dari 2 pertanyaan diperoleh total skor aktual 207 dan total skor ideal 240 dengan persentase 86,2% dan rata-rata skor sebesar 3,45. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang laporan keuangan harus dapat dipahami adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah memenuhi kriteria dapat dipahami.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah diterapkan dalam kuisisioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel, apabila R hitung > R tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid.

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	,766	0,361	VALID
Pertanyaan 2	,827	0,361	VALID
Pertanyaan 3	,673	0,361	VALID
Pertanyaan 4	,488	0,361	VALID
Pertanyaan 5	,434	0,361	VALID
Pertanyaan 6	,702	0,361	VALID
Pertanyaan 7	,468	0,361	VALID
Pertanyaan 8	,596	0,361	VALID
Pertanyaan 9	,409	0,361	VALID
Pertanyaan 10	,388	0,361	VALID

Sumber: Pengolahan data, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid karena R hitung > dari R tabel.

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	,728	0,361	VALID
Pertanyaan 2	,728	0,361	VALID
Pertanyaan 3	,857	0,361	VALID
Pertanyaan 4	,527	0,361	VALID
Pertanyaan 5	,577	0,361	VALID
Pertanyaan 6	,851	0,361	VALID
Pertanyaan 7	,905	0,361	VALID
Pertanyaan 8	,926	0,361	VALID
Pertanyaan 9	,823	0,361	VALID
Pertanyaan 10	,794	0,361	VALID
Pertanyaan 11	,852	0,361	VALID

Sumber: Pengolahan data, 2021

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid karena R hitung > dari R tabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variable dan disusun dalam satu bentuk kuisisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Kuisisioner dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha lebih dari 0,6 (Wiratna Sujerweni,2014).

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan	,763	0,60	RELIABEL
Kualitas Laporan Keuangan	,919	0,60	RELIABEL

Sumber: Pengolahan data,2021

Berdasarkan hasil pengujian untuk uji reliabilitas didapatkan nilai cronbach alpha sebesar 0,763 dan 0,919 lebih dari 0,6 maka data sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah reliabel.

4.3.3 Analisis Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal.

Tabel 4.16 Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman

<i>Correlations</i>			
		Sistem Akuntansi Keuangan	Kualitas Keuangan
Sistem Akuntansi Keuangan	<i>Pearson Correlation</i>	1	,841**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,000
	N	30	30
Kualitas Keuangan	<i>Pearson Correlation</i>	,841**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan hasil SPSS untuk koefisien korelasi didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka kedua variabel yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan atau berkorelasi. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah memiliki nilai pearson correlation sebesar 0,841 maka korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasi sangat kuat dan bentuk hubungan positif searah yaitu semakin tinggi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi kualitas keuangan dan sebaliknya (Sugiyono,2018)

4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya dari pengaruh variabel bebas (sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan).

Tabel 4.17 Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,696	2,95407
a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan				

Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,707 artinya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah sebesar 70,7%. Sedangkan 29,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3.5 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara t hitung dengan t tabel yang terdapat dalam tabel distribusi t. Adapun taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (degree of freedom) $df = n - 2$.

Tabel 4.18 Analisis Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13,063	6,133		-2,130	,042
	Sistem Akuntansi Keuangan	1,432	,174	,841	8,211	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Keuangan

Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan hasil SPSS uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai t hitung 8,211 > t tabel 2,048 maka keputusan yang diambil yaitu tolak H0 terima H1 artinya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah

4.4 Pembahasan

4.4.1 Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Berdasarkan pada tabel 4.6 dan gambar 4.1, jumlah skor total tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari 1 pernyataan diperoleh total skor aktual 106 dan total skor ideal 120 dengan persentase 88,3% dan rata-rata skor sebesar 3,53. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4.4.2 Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan pada tabel 4.7 dan gambar 4.2, jumlah skor total tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum dari 5 pertanyaan diperoleh total skor aktual 523 dan total skor ideal 600 dengan persentase 87,1% dan rata-rata skor sebesar 3,48. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

4.4.3 Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pada tabel 4.8 Gambar 4.3, jumlah skor total tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik dari 4 pertanyaan diperoleh total skor aktual 417 dan total skor ideal 480 dengan persentase 86,87% dan rata-rata skor sebesar 3,47. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan laporan keuangan di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah sesuai dan dilakukan secara periodik.

4.4.4 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan pada tabel 4.9 dan gambar 4.4, jumlah skor total tanggapan responden tentang kualitas laporan keuangan dari 11 pertanyaan diperoleh total skor aktual 1113 dan total skor ideal 1320 dengan persentase 84,3% dan rata-rata skor sebesar 3,37. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang laporan keuangan harus andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan model statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Dapat dilihat pada tabel 4.15 taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (degree of freedom) $df = n - 2$. Menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan jika dilihat dari hasil perbandingan nilai t hitung dan t tabel, maka nilai t hitung sebesar $8,211 >$ nilai t tabel $2,048$. Sehingga H_1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa variabel *sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siska Yulia Defitri (2018) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem

akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Perumahan dan Pemukiman termasuk kedalam kategori sangat baik. Mengenai standar akuntansi pemerintahan, proses pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan standar akuntansi, serta hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat dilaporkan secara periodik.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam katagori sangat baik. Artinya laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Perumahan dan Pemukiman merupakan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu khususnya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi yang menjadi subjek dalam penelitian ini perlu memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami, dalam penggunaannya, ataupun dalam hal mengetahui standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah yang diterapkan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten

Sukabumi.

3. Untuk peneliti berikutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak terbatas hanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun dapat menambah variabel independen lain seperti, sistem pengendalian internal, pemahaman SAP, penerapan *good gogovernance*, standar akuntansi pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah, dan *good government governance* yang mungkin memiliki pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terfokus pada satu Dinas, namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada beberapa Dinas yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. agar dapat menggambarkan secara umum dan luas mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, Y. Dewi, S, P. Ayu, A, P. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia
- Artana, Arlia Sari. 2016. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Aslim, Darwanis, Usman Abu Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 1. Universitas Syiah Kuala.
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020, <http://www.bpk.go.id>.
- Cahya Putra, Vicky Dzaki. Romli. 2020. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Vol. 17. No. 1. Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Defitri, Siska Yulia. 2017. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Vol. 8. No. 30. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Drama, Harken. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Padang. Padang.
- Erniati, 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. Di <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Erawati, Teguh. Abdulhadi, Muhamad Firas. 2018. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Vol. 15. No. 1. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Fajar, Adrianus. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

- FITRA kabupaten sukabumi, kesalahan berulang pada tahun 2017, <https://sukabumiupdate.com/posts/49437/fitra-soroti-lima-kesalahan-berulang-pengelolaan-keuangan-pemkab-sukabumi>
- Hantono. Rahmi, N. U. 2018. *Pengantar Akuntans*. Yogyakarta: Deepublish
- Halim, Abdul. 20017. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nabila, G, Z. 2021. *Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.bernas.id/80180-pengertian-akuntansi-pemerintahan-karakteristik-dan-tujuan-penggunaannya>
- Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. 2017. “*Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12 No. 2.
- Purba, Rahim Br, dan Amrul, Azima Mendina. 2018. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Ktivities Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Medan: *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Volume 18 No. 2. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Pujanira, Putrisari. Taman, Abdullah. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. *Jurnal Nominal*. Vol. 6 No. 2. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintahan No.12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 215/PMK.05/2016) mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Salam, A., & Sutaryo. (2019) Kesesuaian Pelaporan Sistem Keuangan Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*.

Sihombing, Binsar. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta : Bandung.

Sugiyono. 2018, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). *Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik,1(1)*, 88-96.

Soleha, Nurhayati. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten*. Banten: *Jurnal Ekonomi* Volume 13 No. 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Tegor. Dkk. 2021. *Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Riau. *Jurnal Cafeteria*. Universitas Karimun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richman Nurdiansah
Alamat : Kp. Marinjung Tengah RT.004 RW.001 Desa
Karangpapak Kecamatan Cisolok
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 13 Juni 1997
Agama : Islam
Pendidikan
• TK : TK Al-Ikhlas
• SD : SDN Marinjung
• SMP : SMPN 1 Cisolok
• SMA : SMAN 1 Pelabuhanratu
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, November 2021
Peneliti

(Richman Nurdiansah)

LAMPIRAN



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukabumi

TANDA TERIMA

Telah terima dokumen/surat dari : Universitas Pakuan

Perihal : Permohonan Peta / Monev / Data

Ditujukan kepada :

Hari, Tanggal Senin 16 Agustus 2021 Jam

Yang menyerahkan,

Richman



Yang menerima,

[Signature]

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN ANTARA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN SUKABUMI

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian tugas akhir/skripsi. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan bersifat rahasia, termasuk untuk data terkait identitas dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian tugas akhir/skripsi semata.

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr:

- a. No. Responden : _____
- b. Umur : 1. 20 s/d 30 tahun 3. 41 s/d 50 tahun
 2. 31 s/d 40 tahun 4. > 50 tahun
- c. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
- d. Pendidikan Terakhir : 1. SMA 3. S1
 2. DIII 4. S2
- e. Masa Bekerja : 1. 1 s/d/ 10 tahun 3. 21s/d 30 tahun
 2. 11 s/d 20 tahun 4. > 30 tahun

A. Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan merujuk pada penelitian Permadi, 2013

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Sdr.

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Tidak Setuju (TS)
4. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)				

B. Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum erujuk pada penelitian Permadi, 2013 dan Harken, 2014

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
2	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi				
3	Pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan				
4	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini didukung oleh bukti transaksi				
5	Pada Dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis				
6	Pada Dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi				

C. Mengenai Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik (Permadi, 2013 dan Harken, 2014)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
7	Pada Dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya				
8	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan				
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi				

10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodic				
----	--	--	--	--	--

D. Mengenai Laporan Keuangan Harus Relevan (Fajar, 2010 Permadi, 2013 dan Harken, 2014)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu				
2	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang				

E. Mengenai Laporan Keuangan Harus Andal (Fajar, 2010 Permadi, 2013 dan Harken, 2014)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
3	Penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi				
4	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan				
5	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan				
6	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda				
7	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu				

F. Mengenai Laporan Keuangan Harus Dapat Dibandingkan (Fajar, 2010 Permadi, 2013 dan Harken, 2014)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
8	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
9	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama				

G. Mengenai Laporan Keuangan Harus Dapat Dipahami (Fajar, 2010 Permadi, 2013 dan Harken, 2014)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
10	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas				
11	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna				

Hasil Uji Validitas

Correlations												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
P1	Pearson Correlation	1	,627**	,350	,331	,175	,397*	,510**	,434*	,218	,397*	,766**
	Sig. (2-tailed)		,000	,058	,074	,355	,030	,004	,016	,247	,030	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	,627**	1	,681**	,433*	,356	,621**	,292	,367*	,167	,198	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,017	,053	,000	,117	,046	,379	,295	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	,350	,681**	1	,034	,390*	,561**	,227	,231	,097	,066	,673**
	Sig. (2-tailed)	,058	,000		,860	,033	,001	,227	,220	,609	,729	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	,331	,433*	,034	1	,347	,489**	,067	,098	,144	,049	,488**
	Sig. (2-tailed)	,074	,017	,860		,060	,006	,723	,607	,447	,797	,006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	,175	,356	,390*	,347	1	,611**	,078	-,045	-,200	-,408*	,434*
	Sig. (2-tailed)	,355	,053	,033	,060		,000	,682	,812	,288	,025	,017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	,397*	,621**	,561**	,489**	,611**	1	,033	,292	,056	-,005	,702**
	Sig. (2-tailed)	,030	,000	,001	,006	,000		,863	,118	,767	,980	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	,510**	,292	,227	,067	,078	,033	1	,066	,000	,132	,468**
	Sig. (2-tailed)	,004	,117	,227	,723	,682	,863		,729	1,000	,487	,009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	,434*	,367*	,231	,098	-,045	,292	,066	1	,649**	,579**	,596**
	Sig. (2-tailed)	,016	,046	,220	,607	,812	,118	,729		,000	,001	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	,218	,167	,097	,144	-,200	,056	,000	,649**	1	,480**	,409*
	Sig. (2-tailed)	,247	,379	,609	,447	,288	,767	1,000	,000		,007	,025
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	,397*	,198	,066	,049	-,408*	-,005	,132	,579**	,480**	1	,388*
	Sig. (2-tailed)	,030	,295	,729	,797	,025	,980	,487	,001	,007		,034
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	,766**	,827**	,673**	,488**	,434*	,702**	,468**	,596**	,409*	,388*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,006	,017	,000	,009	,001	,025	,034	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji validitas

Correlations													
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	Total
P1	Pearson Correlation	1	,401*	,607**	,530**	,614**	,354	,543**	,661**	,606**	,607**	,683**	,728**
	Sig. (2-tailed)		,028	,000	,003	,000	,055	,002	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	,401*	1	,401*	,336	,424*	,682**	,677**	,707**	,656**	,401*	,471**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,028		,028	,069	,019	,000	,000	,000	,000	,028	,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	,607**	,401*	1	,413*	,520**	,692**	,762**	,756**	,709**	,732**	,800**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,028		,023	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	,530**	,336	,413*	1	,523**	,348	,200	,618**	,317	,413*	,357	,527**
	Sig. (2-tailed)	,003	,069	,023		,003	,059	,290	,000	,088	,023	,052	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	,614**	,424*	,520**	,523**	1	,255	,331	,500**	,422*	,378*	,476**	,577**
	Sig. (2-tailed)	,000	,019	,003	,003		,173	,074	,005	,020	,039	,008	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	,354	,682**	,692**	,348	,255	1	,852**	,766**	,625**	,692**	,705**	,851**
	Sig. (2-tailed)	,055	,000	,000	,059	,173		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	,543**	,677**	,762**	,200	,331	,852**	1	,773**	,848**	,657**	,746**	,905**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,290	,074	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	,661**	,707**	,756**	,618**	,500**	,766**	,773**	1	,717**	,756**	,809**	,926**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	,606**	,656**	,709**	,317	,422*	,625**	,848**	,717**	1	,470**	,526**	,823**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,088	,020	,000	,000	,000		,009	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	,607**	,401*	,732**	,413*	,378*	,692**	,657**	,756**	,470**	1	,800**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,028	,000	,023	,039	,000	,000	,000	,009		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	,683**	,471**	,800**	,357	,476**	,705**	,746**	,809**	,526**	,800**	1	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,000	,052	,008	,000	,000	,000	,003	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	,728**	,728**	,857**	,527**	,577**	,851**	,905**	,926**	,823**	,794**	,852**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,763	10

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,919	11

Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Sistem Akuntansi Keuangan	Kualitas Keuangan
Sistem Akuntansi Keuangan	Pearson Correlation	1	,841**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	30	30
Kualitas Keuangan	Pearson Correlation	,841**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,696	2,95407

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13,063	6,133		-2,130	,042
	Sistem Akuntansi Keuangan	1,432	,174	,841	8,211	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Keuangan